

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU
TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

NINI ROSALISFA BUNGIN

E051 181 013



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU
TIMUR

Disusun dan diajukan oleh
NINI ROSALISFA BUNGIN
E051 181 013

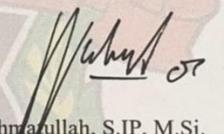
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nurlinah, M.si
NIP. 19630912 198702 2001


Rahmatullah, S.IP, M.Si.
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Drs. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU
TIMUR**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**NINI ROSALISFA BUNGIN
E051 181 013**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 22 November 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof.Dr. Nurlinah, M.Si.

Sekretaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof.Dr. Nurlinah, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nini Rosalisfa Bungin

Nim : E051 181 013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Judul Skripsi : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 November 2022



Nini Rosalisfa Bungin

PRAKATA

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”
(Amsal 23:18)

Syalom

Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena limpahan Kasih Karunia, Anugerah dan Penyertaan-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Lewat kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua Orang tua tercinta dan terkasih Sampe Bungin dan Mada Mathius Minggu. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terimakasih juga kepada saudara penulis Sofyan Bungin dan Hizkiah Bungin yang selalu ada untuk bertukar pikiran, mensupport, menasehati, memberikan saran-saran, dan senantiasa menguatkan penulis serta yang memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan.

Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu ada, mensupport, membantu banyak dalam segala hal selama menjalani proses

perkuliahan. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang terkasih, Orang tua tercinta, saudara, keluarga besar, sahabat, teman-teman seperjuangan, dan seluruh orang-orang baik yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis, terima kasih akan penulis selalu haturkan kepada seluruh orang-orang terkasih.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kebijakan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr.Phill Sukri, S.IP, M.Si
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas Dr.A.M,Rusli M.Si, yang telah memberi arahan dan motivasi dalam hal pengurusan skripsi serta kebijakan yang sangat menunjang penyelesaian studi penulis.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II yang

senantiasa membimbing dan memberikan arahan dan masukan yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si. selaku penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan yang senantiasa membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnawati, S.IP selaku Staff Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Pricil yang kecil sikili, Cindy yang tingkat kemagerannya sudah mencapai level dewa, Erika Gomezz yang kurang beruntung dalam percintaannya terimakasih yah kalian masih solid sampai sekarang, terimakasih karena selalu kebersamai dalam suka maupun duka, terimakasih

atas kesabaran kalian yang sangat luar biasa dalam menghadapi sifat emosianku, terimakasih yang sebesar-besarnya dari saya untuk kalian wanitaku.

10. Kepada Made Santana 24/7 ku, terimakasih untuk telinga dan lengan yang selalu ada, terimakasih sudah jadi teman bicara, beradu argumen, berbagi rasa dan bertukar cerita, kadang jadi teman berkelahi juga hehehe, terimakasih sudah sabar hadapi saya dengan segala ego dan keras kapalaku, terimakasih sudah mau berjuang bersama untuk lebih baik. “Terimakasih sudah memilih tetap bersamaku”.

11. Terimakasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas sebagai rumah kedua bagi penulis. Terimakasih kepada: “*Fraternity*” 2012, “*Labensraum*” 2013, “*Fidelitas*” 2014, “*Federasi*” 2015, “*Verenigen*” 2016, “*Kaizen*” 2017, “*Zeitgeist*” 2019, “*Maintiendrai*” 2020, dan “*Dignite*” 2021. Terimakasih telah memberikan ruang belajar bagi penulis untuk belajar serta berbagi pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan, semoga identitas Merdeka Militan selalu melekat pada kader-kader Himapem. Salam Merdeka Militan Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita.

12. Kepada saudara-saudari **ELEFThERIA** yang telah memberikan warna, berbagi pengalaman, dan kebersamaan

yang terjalin selama perkuliahan, meskipun kita tidak solid sekali tapi ada-ada ji selalu, semoga tetap saling mengingat, Terimakasih guys.

13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama perkuliahan.

14. . Kepada PMKO Fisip Unhas, terima kasih telah memberikan wadah bagi penulis untuk menumbuh kembangkan Iman serta memberikan sukacita bagi penulis selama ber-PMKO.

15. Kepada saudara-saudari seiman penulis AMORE Fisip Unhas yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih untuk doa, dukungan dan kebersamaan selama berada di Sospol.

16. Kepada Teman-teman KKN gelombang 106 Tamalanrea 15, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan kerjasamanya selama ber KKN meskipun tidak solid kek posko yang lain tapi tetap terimakasih guys.

17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna*

thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun untuk melengkapi segala kekurangan penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembaca dan sekiranya dapat bermanfaat untuk menjadi referensi untuk penulisan selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati

Makassar, 9 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Peran	10

2.2. Pemerintah Daerah	12
2.3. Pemeritah Desa.....	17
2.4. Pembangunan	19
2.5. Pembangunan Desa.....	22
2.5. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	27
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3. Informan Penelitian	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6. Fokus Penelitian.....	32
3.7. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	35
4.1.1. Sejarah Kabupaten Luwu Timur	35
4.1.2. Geografi dan Administrasi Wilayah	42
4.1.3. Demografi	45
4.1.4. Topografi.....	47
4.1.5. Sosial dan Ekonomi.....	49

4.2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.....	52
4.2.1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
4.2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.....	54
4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur	58
4.2.4. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur	67
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Tomoni	69
4.3.1. Sejarah Kecamatan Tomoni	69
4.3.2. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah	71
4.3.3 Jumlah Penduduk	72
4.3.4. Sosial dan Budaya	73
4.4. Gambaran Umum Desa Kalpataru.....	76
4.4.1. Sejarah Desa Kalpataru.....	76
4.4.2. Visi dan Misi Kepala Desa	80
4.4.3. Keadaan Geografis Desa Kalpataru	81
4.4.4. Demografi Desa Kalpataru.....	83
4.5. Gambaran Umum Desa Rante Mario.....	84
4.5.1. Sejarah Desa Rante Mario.....	84
4.5.2. Visi dan Misi Kepala Desa	85
4.5.3. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Rante Mario	86

4.6 Pembahasan dan Hasil	88
4.6.1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan.....	138
5.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur.....	43
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3. Topografi Wilayah Kabupaten Luwu Timur	47
Tabel 4. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	48
Tabel 5. Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai	68
Tabel 6. Golongan Kepangkatan.....	68
Tabel 7. Topografi Wilayah Kecamatan Tomoni	72
Tabel 8. Data Jumlah RT Desa Kalpataru.....	82
Tabel 9. Data Prasarana Jalan Kabupaten di Kecamatan Tomoni.....	92
Tabel 10. Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tomoni Tahun 2020-2022	101
Tabel 11. Rencana Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tomoni Tahun 2020-2022.....	105
Tabel 12. Latar Belakang Pendidikan Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur.....	114
Tabel 13. Data Peningkatan Jalan Kabupaten dan Anggaran di Kecamatan Tomoni Tahun 2020-2022.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep.....	26
Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur	44
Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur.....	48
Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur	49
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur	66
Gambar 6. Prosedur Perencanaan Pembangunan Jalan	95
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan MUSREMBANG di Desa Kalpataru ...	97
Gambar 8. Kondisi Jalan Desa Kalpataru Tergenang Air Hujan.....	120
Gambar 9. Jalan Kabupaten di Desa Rantemario-Ujung Baru Sebelum dan Setelah mengalami peningkatan.	126
Gambar 10. Jalan Kabupaten di Desa Kalpataru Sebelum dan Setelah mengalami kerusakan.....	127
Gambar 11. Luapan Sampah pada Drainase yang pembangunannya tidak berlanjut	132
Gambar 12. Gotongroyong masyarakat membersihkan drainase	133
Gambar 13. Kondisi Drainase yang pembangunannya tidak berlanjut...	136

ABSTRAK

NINI ROSALISFA BUNGIN, Nomor Induk Mahasiswa E051181013, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, kurang maksimal dalam pelaksanaannya di karenakan masih banyak daerah-daerah yang belum mengalami pembangunan secara merata khususnya dalam pembangunan jalan dan drainase.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembangunan Desa, Pembangunan Jalan dan Drainase

ABSTRACT

NINI ROSALISFA BUNGIN, Student Identification Number E051181013, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of Local Government in the Implementation of Development in Tomoni District, East Luwu Regency**", under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.si. as supervisor I and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Sc. as mentor II.

This study aims to determine the role of the Public Works and Spatial Planning Office in the implementation of development in Tomoni District, East Luwu Regency which is stated in the East Luwu Regent Regulation Number 56 of 2021 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures at the Public Works and Public Works Service. Spatial planning.

This study used qualitative research methods. This type of data consists of primary data obtained through interviews and observations. While secondary data comes from report documents and regulations related to the Implementation of Development in East Luwu Regency.

The results of the study indicate that: The role of the Regional Government, especially the Public Works and Spatial Planning Office in the implementation of development in Tomoni District, East Luwu Regency, is less than optimal in its implementation because there are still many areas that have not experienced development evenly, especially in the construction of roads and drainage.

Keywords: Role of Government, Local Government, Village Government, Development, Village Development, Road Construction and Drainage

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut B.S Muljana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau Lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Menurut Kuncoro pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya pembangunan berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Singh dan Steinberg (1996) merekomendasikan pembangunan infrastruktur terpadu skala permukiman kota. Oleh sebab itu, perlu adanya studi kebijakan infrastruktur yang mempertimbangkan kriteria dan indikator pembangunan infrastruktur berkelanjutan, berdasarkan kebijakan yang sudah ada dan melakukan umpan balik kepada stakeholder untuk menguji hasil kebijakan dari proses metodologi yang digunakan.

Pembangunan di desa memiliki peran penting karena merupakan unsur yang sangat diperlukan dan memang bersinergi dengan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini terlihat dari banyaknya rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah untuk

pembangunan di desa. Hampir semua instansi, terutama pemerintah daerah, menyesuaikan rencana kerjanya sesuai dengan pembangunan di desa. Tentunya berdasarkan pemahaman bahwa desa merupakan unit geografis terpenting yang menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk.

Desa berada pada posisi paling bawah dalam struktur pemerintahan, tetapi berada di garis depan dan pusat masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan di desa, seperti keberadaan desa-desa terpencil atau terisolasinya pusat-pusat pembangunan (*excellent center*). Infrastruktur sosial ekonomi yang masih kurang, dan distribusi tenaga kerja produktif yang tidak merata, meliputi tingkat produktivitas, pendapatan masyarakat dan latarbelakang Pendidikan yang masih tergolong rendah, semua ini pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan penduduk.

Secara konseptual, pembangunan di desa merupakan proses memadukan upaya masyarakat desa dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan di desa, setidaknya ada dua partisipan yang memainkan peran dasar egaliter, yaitu negara dan masyarakat (Korten, 1988). Menurut definisi berbagai ahli pembangunan di desa adalah upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak ada alasan yang sah untuk menjadikan kebahagiaan dan kemandirian desa sebagai produk politik semata, yang berujung pada stagnasi dan

kemerosotan tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak dapat di pungkiri bahwa semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa tercantum dalam Undang-Undang Desa, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pembangunan Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Di penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.

Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Salah satu wujudnya dalam pembangunan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, karena jalan merupakan infrastruktur penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai dan drainase menjadi jalur aliran air sehingga tidak

adanya genangan di ruas-ruas jalan, dan jalan juga sebagai media untuk kelancaran alat transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk saluran drainase, saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan, serta perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Dengan demikian jalan dan drainase merupakan suatu kesatuan sistem jaringan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh layanan dalam satu hubungan hierarki yang oleh masyarakat dipakai untuk kepentingan baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan kata lain jalan dan drainase juga merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan sebagai saluran aliran air hujan agar tidak menggenangi jalan. Kemudian ketersediaan jumlah jalur jalan serta drainase yang cukup dan dengan kondisi jalan yang baik berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi awal, Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230,09 km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan

Mangkutana di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu dan Burau dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan yang seluruh desa/kelurahannya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Tomoni adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. Terdapat satu sungai yang mengalir Kecamatan ini yaitu sungai Tomoni.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal di lokasi penelitian, infrastruktur jalan yang berada di Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur berstatus jalan kabupaten yang memiliki panjang Ruas Jalan sekitar 7,733 KM dan lebar ruas jalan 4,00 dari batas desa Mandiri hingga batas desa Rantemario begitu pun panjang drainase sedangkan panjang ruas jalan Rantemario-Ujung Baru yang berstatus jalan Kabupaten sekitar 7,412 KM.

Kondisi jalan dan drainase yang berada di Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur pada saat sekarang ini sangat memprihatinkan, karena banyaknya ruas jalan yang rusak dan berlubang sehingga akan lebih mudah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas baik bagi pengendara, maupun bagi pejalan kaki serta drainase yang ada sekarang pembangunannya tidak merata sehingga mengakibatkan masih banyak ruas jalan yang tergenang air pada saat hujan. Bahkan banyak

masyarakat yang mengeluh melihat kondisi ruas jalan tersebut yang berlubang serta pembangunan drainase yang yang tidak merata. Pembangunan jalan di Desa Kalpataru terakhir kali di adakan pada tahun 2012 dengan panjang ruas jalan yang di bangun yaitu 7,733 KM dan drainase pada tahun 2018 dengan panjang drainase yang di bangun yaitu 5,333 KM, sedangkan pembangunan jalan di Desa Rantemario terakhir kali pembangunannya di adakan pada tahun 2015 dan 2020 dengan panjang ruas jalan yang di bangun yaitu 6,101 KM dan drainase pada tahun 2017 dengan panjang drainase 3,101 KM oleh karena itu masyarakat sangat mengharapkan pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pembangunan jalan dan drainase di Desa Kalpataru dimana Dinas PUPR yang memiliki peran sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Sebagaimana pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pasal 10 Bidang Bina Marga bagian f,g,h dan Pasal 13 Bidang Cipta Karya bagian m mempunyai tugas :

Bidang Bina Marga

f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;

g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;

h. melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;

Bidang Cipta Karya

m. melaksanakan pengelolaan dan pembangunan sistem drainase pada wilayah strategis kabupaten;

Di dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Pada Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada pasal 10 Bidang Bina Marga bagian f,g,h dan pasal 13 Bidang Cipta Karya bagian m, maka dari peraturan ini, menjadi dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan drainase serta meningkatkan

kualitas atau mutu dan mengevaluasi kembali fungsi jalan dan drainase tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal di lokasi penelitian keadaan ruas jalan yang ada di Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur pada saat ini masih rusak dan berlubang serta kondisi drainase yang pembangunannya tidak merata dan belum ada tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pembangunan jalan dan drainase secara merata.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada permasalahan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pembangunan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan di kecamatan Tomoni kabupaten luwu timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi masyarakat tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan di Kecamatan Tomoni, dan hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan

masuk dalam perumusan kebijakan terkait pembangunan di kecamatan.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari terkait peran pemerintah daerah dalam pembangunan di kecamatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah uraian teori-teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji lebih dalam permasalahan penelitian. Teori-teori selanjutnya dijadikan sebagai batas-batas logis penelitian dan menjadi asumsi dasar penelitian dilakukan. Dalam menganalisis masalah yang diangkat, penulis menggunakan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian Peran, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembangunan Desa, Kerangka Konseptual.

2.1. Peran

Peran berasal dari kata “peran” yang artinya merupakan bagian dari atau memiliki pimpinan utama. Peranan atau role juga diartikan

sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peran merujuk pada kelompok yang kurang lebih berperilaku homogen, yang didefinisikan oleh norma dan diharapkan oleh warga dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi perannya atau ekspektasi lainnya.

Menurut Levinson (2002:200) yang dikutip dalam Soedjono (2002:200), peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sangat penting bagi struktur sosial masyarakat, termasuk peran yang berkembang sesuai dengan status atau status individu. Status dalam masyarakat Norma, dalam pengertian ini, peran adalah serangkaian aturan yang memandu kehidupan sosial masyarakat. Peran artinya ketika seseorang memasuki komunitas dalam skala kecil (keluarga) dan skala besar (komunitas besar), setiap orang harus belajar memainkan peran tertentu. Peran sosial yang perlu dikaji meliputi dua aspek, yaitu belajar memenuhi kewajiban dan menuntut hak dari peran tersebut, serta memiliki sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Merton dari Raton mengungkapkan bahwa peran diartikan sebagai cara berperilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang untuk

mengambil posisi atau posisi tertentu (Raho, 2007:67). Oleh karena itu peran adalah keutuhan hubungan yang terbentuk akibat peran individu dalam status sosial masyarakat.

Scott dkk. Dalam Kanfer, dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

1. Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
2. Peran terkait dengan perilaku kinerja (task behavior), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
3. Peran sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
4. Peran non-kerja (jobs) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987:197).

2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk memelihara sistem ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal. Dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya permintaan, maka peran pemerintah pun berubah menjadi melayani masyarakat. Intinya, pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pemerintahan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi agar setiap anggota dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sendiri-sendiri untuk mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2011:13).

Osborne dan Gaebler yang dikutip oleh Rasyid (2011:19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggung jawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan negara, yang melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas

dasar tertentu untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, tanggung jawab dan wewenang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan nasional secara keseluruhan yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah

daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire*, tetapi ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli:

1) Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2) Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negaranegara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skil dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau

zona aman. Contohnya masyarakat tidak berpendidikan, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja:2002) Di setiap daerah pasti ada pemerintahan yang berlaku dan dilindungi undang-undang dalam melaksanakan tugasnya. Tak terkecuali juga bagi desa yang diatur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa. Hal mengenai Pemerintah Desa yang juga disebut sebagai Pemdes diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Menurut UU tersebut, Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216

ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum. Setiap wilayah pemerintahan pasti akan dipimpin oleh mereka yang terpilih dan untuk melaksanakannya, pemerintahan desa tersebut yang dipimpin kepala desa. Tugasnya tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) yang berisi kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan ini nantinya tidak akan ditetapkan sendiri, melainkan akan ditetapkan bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kepala desa juga berwenang untuk mengajukan rancangan peraturan desanya sendiri yang sesuai dengan UU, membina kehidupan, perekonomian masyarakat desa hingga mengordinasikan segala elemen yang ada dalam melakukan pembangunan desa secara partisipatif untuk kemajuan dan kepentingan desa. Tak hanya itu saja, kepala desa juga dapat mewakili desanya baik untuk dalam maupun di luar peradilan yang mana juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang juga melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga berhak untuk mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa). APBDesa ini nantinya akan dibahas dan ditetapkan bersama BPD sehingga menghindari adanya penyelewengan dana. Oleh karena itulah, tugas dan kewenangan kepala desa ini didampingi oleh BPD.

2.4. Pembangunan

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto yang menyimpulkan beberapa makna

pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut : (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free). (4) pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta- disciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideologi of developmentalism. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific.”

a) Pembangunan Fisik

Menurut B.S Muljana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Menurut Kuncoro pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak

oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

b) Pembangunan Non-fisik

Menurut Wresniwiro pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat. Bachtiar Effendi menyatakan di dalam pembangunan suatu daerah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara pembangunan fisik maupun non-fisik diharapkan dapat berjalan seimbang.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.

2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa

dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan.

Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus di laksanakan dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuandari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervise, dan pendampingan. Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peran yang penting dalam konteks pembangunan nasional.

Pembangunan desa ini tidak hanya selalu memebicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusi adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan

sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan.

Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basis perubahan.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembanguna ;
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

2.5. Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dengan berbagai masalah yang terjadi seperti yang diuraikan dalam latar belakang, maka secara jelasnya untuk melihat alur penelitian dan penulisan dapat tergambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep

